

BAB IV

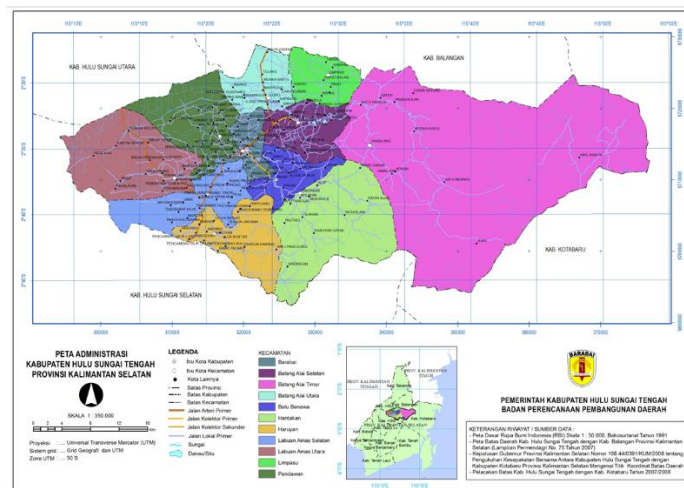
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian tengah Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Kabupaten di Barabai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.771 km² dengan 11 kecamatan, 8 kelurahan dan 161 desa, dengan semboyan daerah “Murakata”, yang bermakna mufakat dan seia sekata baik dalam pemikiran maupun dalam pelaksanaan. HST memiliki posisi strategis sebagai berada di pusat kawasan Benua Anam dan berperan sebagai pusat aktivitas perdagangan serta pelayanan ekonomi regional.

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Sumber : RPJM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

Secara administratif dan historis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdiri sebagai daerah otonom berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 5 Desember 1959 Nomor Des-575-1-9. Sejak tanggal 24 Desember 1959, Kabupaten Hulu Sungai Tengah resmi berdiri sendiri dan terpisah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun pembagian wilayah administratif dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4. 1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas (km ²)	(%)	Kelurahan	Desa	RW	RT
1	Haruyan	Haruyan	101,35	5,72	–	17	51	103
2	Batu Benawa	Pagat	54,44	3,07	–	14	41	80
3	Hantakan	Hantakan	208,55	11,78	–	12	36	60
4	Batang Alai Selatan	Birayang	76,06	4,30	1	18	51	90
5	Batang Alai Timur	Tandilang	778,71	43,98	–	11	33	57
6	Barabai	Barabai	40,71	2,30	6	12	30	90
7	Labuan Amas Selatan	Pantai Hambawang	97,82	5,52	1	17	51	91
8	Labuan Amas Utara	Kasarangan	170,32	9,62	–	16	40	102
9	Pandawan	Pandawan	116,41	6,57	–	21	60	127
10	Batang Alai Utara	Ilung	65,36	3,69	–	14	42	82
11	Limpasu	Limpasu	61,04	3,45	–	9	27	47
Total			1.770,77	100	8	161	462	929

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka tahun 2024, 2025.

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara di sebelah barat, Kabupaten Kotabaru di sebelah timur, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah selatan, dan Kabupaten Balangan di sebelah utara. Letak geografis ini menempatkan Kabupaten Hulu

Sungai Tengah sebagai wilayah penghubung antar kabupaten di kawasan Banua Anam yang memiliki peran penting dalam aktivitas sosial dan ekonomi regional.

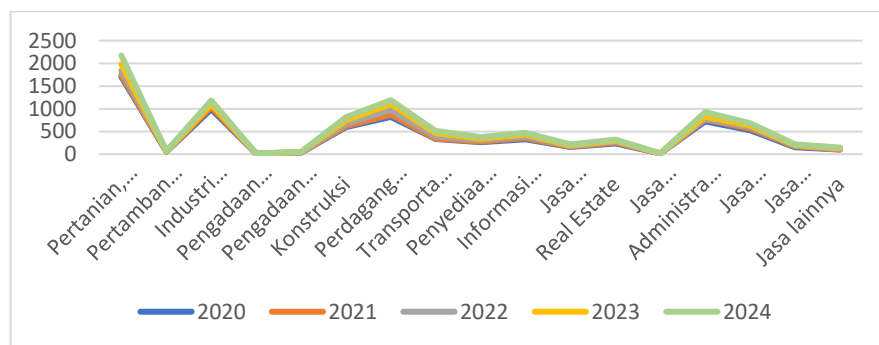
Dari aspek kondisi alam, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Secara topografis, wilayah ini terdiri atas kawasan rawa, dataran rendah, serta wilayah pegunungan yang merupakan bagian dari Pegunungan Meratus. Ketinggian wilayah bervariasi mulai dari sekitar $\pm 9,53$ meter di Kecamatan Labuan Amas Utara hingga ± 1.894 meter di Gunung Halau-halau yang merupakan titik tertinggi di kawasan Pegunungan Meratus. Variasi ketinggian dan kemiringan lahan yang berkisar antara 0–40 % memberikan pengaruh terhadap pola pemanfaatan lahan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Kondisi iklim di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan karakter iklim tropis basah dengan tingkat kelembaban udara yang relatif tinggi dengan curah hujan yang relatif tinggi dengan jumlah hari hujan yang cukup merata sepanjang tahun turut memengaruhi aktivitas ekonomi, terutama pada sektor-sektor yang bergantung pada kondisi alam seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan jumlah penduduk 271,2 ribu jiwa dengan tingkat kepadatan 172 km^2 , penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah berperan sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi daerah, baik sebagai tenaga kerja, produsen, maupun konsumen, sehingga dinamika kependudukan turut memengaruhi perkembangan perekonomian wilayah.

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut Lapangan Usaha

tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah ini masih bercorak agraris, tercermin dari besarnya kontribusi lapangan usaha pertanian yang mendominasi dengan pengaruh mencapai 23,18% terhadap total PDRB pada tahun 2024, hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 4. 2 PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024(Milyar Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2025.

Selain sektor pertanian, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menjadi kontributor terbesar berikutnya dengan porsi 12,68%, diikuti oleh industri pengolahan yang relatif stabil dengan kontribusi 12,63 %, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 9,93 %, sektor konstruksi 8,68 %, serta jasa pendidikan 7,28 %, yang secara keseluruhan menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih didominasi sektor primer dengan dukungan sektor tersier.

Berdasarkan karakteristik geografis dan kondisi alam tersebut, struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam dan kondisi wilayahnya. Aktivitas ekonomi masyarakat berkembang pada berbagai sektor, baik sektor primer maupun sektor tersier, dengan kontribusi yang berbeda-beda terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) daerah. Perbedaan kontribusi dan perkembangan antar sektor inilah yang menjadi dasar penting dalam mengkaji potensi sektor ekonomi serta disparitas wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya dianalisis pada bagian berikutnya dalam penelitian ini.

2. Potensi Sektor Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pemetaan potensi sektor ekonomi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis serta menganalisis dinamika dan peranannya dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Analisis potensi sektor ekonomi dilakukan dengan menggunakan empat alat analisis, yaitu *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *Tipologi Klassen*, dan *Shift Share*. Keempat metode tersebut digunakan secara komplementer untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai struktur ekonomi, laju pertumbuhan, serta daya saing sektoral di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode penelitian tahun 2020-2024.

Analisis dilakukan terhadap seluruh lapangan usaha dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masing-masing sektor dianalisis menggunakan keempat metode tersebut untuk mengetahui sektor basis dan non basis, kecenderungan perkembangan sektor secara dinamis, posisi sektor dalam struktur pertumbuhan ekonomi daerah, serta kontribusi dan daya saing sektoral dibandingkan wilayah acuan. Wilayah acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

Analisis pertama dilakukan menggunakan *Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis dan non basis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Nilai LQ diperoleh dengan membandingkan kontribusi suatu sektor terhadap total PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan kontribusi sektor yang sama terhadap total PDRB Provinsi Kalimantan Selatan. Apabila nilai LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$), maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor basis, sedangkan nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$) menunjukkan sektor non basis. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil analisis sebagai berikut.

Tabel 4. 2. Hasil Analisis LQ Pada Sektor Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020-2024

NO	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata	Interpretasi
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	1,80	1,81	1,81	1,80	1,80	Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Non Basis
3	Industri Pengolahan	1,13	1,10	1,12	1,10	1,09	1,11	Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,25	1,25	1,27	1,26	1,26	1,26	Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,18	1,16	1,18	1,22	1,22	1,19	Basis
6	Konstruksi	1,12	1,12	1,14	1,15	1,15	1,13	Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,16	1,19	1,20	1,19	1,16	1,18	Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	0,79	0,80	0,74	0,72	0,71	0,75	Non Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,86	1,86	1,84	1,86	1,84	1,85	Basis
10	Informasi dan Komunikasi	1,27	1,29	1,30	1,32	1,32	1,30	Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,64	0,65	0,65	0,66	0,65	0,65	Non Basis
12	Real Estate	1,50	1,49	1,51	1,52	1,51	1,50	Basis
13	Jasa Perusahaan	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,72	1,77	1,78	1,78	1,81	1,77	Basis
15	Jasa Pendidikan	1,61	1,67	1,73	1,75	1,74	1,70	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,03	1,03	1,04	1,06	1,06	1,04	Basis
17	Jasa Lainnya	1,15	1,15	1,16	1,16	1,16	1,15	Basis

Sumber : Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ) pada Tabel 4.2, sebagian besar sektor ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2020–2024 memiliki nilai LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$) sehingga dikategorikan sebagai sektor basis. Secara keseluruhan terdapat 13 sektor basis yang menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki tingkat spesialisasi dan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah dibandingkan wilayah acuan, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa sektor dengan nilai LQ tertinggi antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum (1,85), pertanian, kehutanan, dan perikanan (1,80), serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (1,77). Sementara itu, terdapat 4 sektor non basis, yaitu pertambangan dan penggalian; transportasi dan pergudangan; jasa keuangan dan asuransi; serta jasa perusahaan, yang memiliki nilai LQ kurang dari satu ($LQ < 1$). Hasil ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah didukung oleh beragam sektor basis yang berperan dalam pembentukan PDRB daerah.

Analisis selanjutnya menggunakan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) untuk melihat kecenderungan perubahan peranan sektor ekonomi secara dinamis. Nilai DLQ lebih besar dari satu ($DLQ > 1$) menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang relatif lebih cepat dibandingkan wilayah acuan sehingga bersifat prospektif, sedangkan nilai DLQ kurang dari satu ($DLQ < 1$) mengindikasikan bahwa sektor tersebut tumbuh lebih lambat dan cenderung non prospektif.

Tabel 4. 3. Hasil Analisis DLQ Pada Sektor Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020-2024

NO	Lapangan Usaha	DLQ	Interpretasi
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,69	Non Prospektif
2	Pertambangan dan Penggalian	1,33	Prospektif
3	Industri Pengolahan	0,19	Non Prospektif
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,04	Prospektif
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,51	Non Prospektif
6	Konstruksi	1,16	Prospektif
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,86	Non Prospektif
8	Transportasi dan Pergudangan	0,16	Non Prospektif
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,69	Non Prospektif
10	Informasi dan Komunikasi	2,09	Prospektif
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,18	Prospektif
12	Real Estate	0,80	Non Prospektif
13	Jasa Perusahaan	0,52	Non Prospektif
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,42	Prospektif
15	Jasa Pendidikan	4,99	Prospektif
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	Prospektif
17	Jasa lainnya	1,07	Prospektif

Sumber : Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) pada Tabel 4.3, hanya setengah lapangan usaha di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2020–2024 yang memiliki nilai DLQ lebih besar dari satu. Terdapat 9 sektor yang termasuk sektor prospektif ($DLQ > 1$), yaitu pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Sementara itu, 8 sektor lainnya memiliki nilai DLQ kurang dari satu ($DLQ < 1$) sehingga dikategorikan sebagai sektor non prospektif, yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor tersebut relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Di antara sektor prospektif tersebut, sektor jasa pendidikan memiliki nilai DLQ tertinggi yaitu sebesar 4,99, diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 2,09, yang menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut memiliki dinamika pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan wilayah acuan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa tidak seluruh sektor basis berdasarkan analisis LQ memiliki pertumbuhan yang prospektif, sehingga besarnya kontribusi suatu sektor terhadap PDRB daerah tidak selalu sejalan dengan perkembangan pertumbuhan sektoralnya selama periode analisis.

Selanjutnya, *Tipologi Klassen* digunakan untuk mengelompokkan sektor-sektor ekonomi berdasarkan tingkat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Melalui *Tipologi Klassen*, sektor ekonomi diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu sektor basis prospektif, sektor non basis prospektif, sektor basis non prospektif, serta sektor non basis non prospektif. Pengelompokan ini memberikan gambaran mengenai posisi sektor ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam struktur pertumbuhan regional.

Tabel 4. 4 Hasil Analisis Tipologi Klassen Pada Sektor Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020-2024

Kuadran I Sektor Basis, Prospektif	Kuadran III Sektor Basis, Non-Prospektif
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Listrik dan Gas 2. Konstruksi 3. Informasi dan Komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Industri Pengolahan

<ul style="list-style-type: none"> 4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5. Jasa Pendidikan 6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7. Jasa Lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 4. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6. Real Estate.
<p>Kuadran II Sektor Non-Basis, Prospektif</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Jasa Keuangan dan Asuransi. 	<p>Kuadran IV Sektor Non-Basis, Non-Prospektif</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Transportasi dan Pergudangan 2. Jasa Perusahaan.

Sumber : Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil analisis *Tipologi Klassen*, struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan variasi tingkat kemajuan dan pertumbuhan antar sektor. Sektor yang masuk Kuadran I (sektor basis dan prospektif) meliputi Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan, serta Jasa Lainnya, yang menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut tidak hanya memiliki kontribusi besar terhadap PDRB daerah, tetapi juga tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah acuan. Pada Kuadran II (non-basis tetapi prospektif) terdapat sektor pertambangan dan jasa keuangan yang menunjukkan potensi pertumbuhan meskipun kontribusinya belum dominan. Sementara itu, sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, akomodasi, *real estate*, serta pengadaan air berada pada Kuadran III (basis namun non prospektif), yang berarti kontribusinya besar namun pertumbuhannya relatif melambat. Adapun sektor transportasi dan jasa perusahaan berada pada Kuadran IV (non basis dan non prospektif), yang mencerminkan sektor dengan kontribusi dan pertumbuhan relatif rendah selama periode analisis.

Analisis terakhir dilakukan menggunakan metode *Shift Share* untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi sektoral di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Analisis ini menguraikan perubahan kinerja sektor ekonomi ke dalam tiga komponen utama, yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi wilayah acuan secara keseluruhan (*national share*), pengaruh struktur pertumbuhan sektor (*industry mix*), dan pengaruh keunggulan kompetitif daerah (*competitive share*). Dengan demikian, analisis *Shift Share* tidak hanya menunjukkan tingkat pertumbuhan suatu sektor, tetapi juga menjelaskan apakah pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh dinamika ekonomi regional, karakteristik sektoral, atau keunggulan kompetitif daerah. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh temuan sebagai berikut.

Tabel 4. 5. Hasil Analisis *Shift Share* Pada Sektor Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020-2024

NO	Lapangan Usaha	Nij (miliar Rp)	Mij (miliar Rp)	Cij (miliar Rp)	Dij (miliar Rp)	Rank
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	242,56	-112,55	-35,41	94,60	2
2	Pertambangan dan Penggalian	7,15	-1,08	-1,07	5,01	15
3	Industri Pengolahan	134,89	-10,08	-49,16	75,64	6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,50	0,80	-0,20	2,10	16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,95	0,25	0,09	5,29	14
6	Konstruksi	82,22	3,37	2,26	87,85	3
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	101,86	24,39	-15,03	111,21	1
8	Transportasi dan Pergudangan	45,15	47,64	-39,18	53,60	8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35,78	24,40	-8,97	51,21	9
10	Informasi dan Komunikasi	50,98	27,40	6,25	84,63	4
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,20	-1,67	-1,01	17,52	12
12	Real Estate	34,50	10,13	-4,05	40,58	10
13	Jasa Perusahaan	1,80	0,76	-0,47	2,09	17

14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	88,42	-32,98	12,45	67,89	7
15	Jasa Pendidikan	71,75	-20,27	24,77	76,25	5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,78	9,50	0,61	29,89	11
17	Jasa lainnya	12,71	3,21	-1,14	14,77	13

Sumber : Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* pada Tabel 4.5, seluruh lapangan usaha di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 2020-2024 menunjukkan nilai *Dij* yang positif, yang berarti semua sektor mengalami pertumbuhan ekonomi. Komponen *National Share* (*Nij*) pada seluruh sektor juga bernilai positif, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah secara umum dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi wilayah acuan, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan nilai *Dij*, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor mencatat pertumbuhan terbesar sebesar 111,21 miliar rupiah, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 94,60 miliar rupiah, serta sektor konstruksi sebesar 87,85 miliar rupiah. Sebaliknya, pertumbuhan terkecil terdapat pada sektor jasa perusahaan sebesar 2,09 miliar rupiah, diikuti oleh sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 2,10 miliar rupiah, serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 5,01 miliar rupiah. Dari sisi *Competitive Share* (*Cij*), sektor jasa pendidikan, administrasi pemerintahan, serta informasi dan komunikasi menunjukkan nilai positif yang mengindikasikan adanya keunggulan daya saing daerah, sedangkan sektor industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta pertanian memiliki nilai *Cij* negatif yang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi wilayah acuan dibandingkan oleh keunggulan kompetitif daerah.

Hasil dari keempat analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara terpadu untuk menentukan sektor-sektor ekonomi yang berperan sebagai sektor basis, sektor potensial, serta sektor yang memerlukan perhatian khusus dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembahasan hasil analisis tersebut disajikan secara rinci pada subbab berikutnya.

3. Tingkat Disparitas Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemetaan potensi sektor ekonomi, tetapi juga menganalisis disparitas atau bisa juga disebut sebagai tingkat ketimpangan pembangunan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2020–2024, dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai fokus utama pembahasan. Analisis ketimpangan wilayah dilakukan untuk melihat posisi relatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam struktur pembangunan regional serta dinamika ketimpangan yang terjadi di tingkat provinsi.

Dalam penelitian ini, ketimpangan pembangunan wilayah dianalisis menggunakan *Indeks Williamson* untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota dengan mempertimbangkan perbedaan pendapatan regional dan jumlah penduduk sebagai pembobot. Nilai *Indeks Williamson* berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai *Indeks Williamson* diklasifikasikan ke dalam kategori ketimpangan rendah ($IW < 0,3$), ketimpangan sedang ($0,3 \leq IW < 0,5$), dan ketimpangan tinggi ($IW \geq 0,5$).

Berdasarkan hasil perhitungan *Indeks Williamson* yang telah dilakukan terhadap seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2020–2024, diperoleh gambaran mengenai tingkat ketimpangan pembangunan

wilayah serta posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yang selanjutnya disajikan dan dianalisis pada bagian berikutnya.

Tabel 4. 6. Hasil Analisis *Indeks Williamson* Pada Sektor Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020-2024

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata	Interpretasi
Tanah Laut	0,02702	0,02723	0,02705	0,02685	0,02671	0,02697	Rendah
Kotabaru	0,18496	0,18369	0,18061	0,17789	0,17860	0,18115	Rendah
Banjar	0,13207	0,13314	0,13532	0,13793	0,13958	0,13561	Rendah
Barito Kuala	0,11838	0,11911	0,12179	0,12355	0,12408	0,12138	Rendah
Tapin	0,00964	0,00947	0,00901	0,00906	0,00870	0,00918	Rendah
Hulu Sungai Selatan	0,08656	0,08513	0,08641	0,08602	0,08582	0,08599	Rendah
Hulu Sungai Tengah	0,10568	0,10562	0,10659	0,10734	0,10699	0,10644	Rendah
Hulu Sungai Utara	0,12901	0,12900	0,12972	0,13022	0,13066	0,12972	Rendah
Tabalong	0,19473	0,19332	0,19384	0,19338	0,19224	0,19350	Rendah
Tanah Bumbu	0,13730	0,13891	0,13937	0,13792	0,13604	0,13791	Rendah
Balangan	0,21351	0,21178	0,21152	0,20825	0,20421	0,20985	Rendah
Kota Banjarmasin	0,01456	0,01717	0,02305	0,02971	0,03563	0,02402	Rendah
Kota Banjarbaru	0,06142	0,06346	0,06027	0,05817	0,05685	0,06003	Rendah

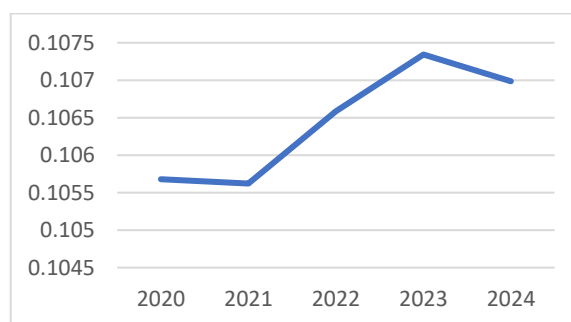
Sumber : Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan *Indeks Williamson* kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2020–2024, seluruh wilayah menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan yang tergolong rendah karena nilai indeks berada di bawah batas 0,3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebagai wilayah fokus penelitian memiliki nilai rata-rata *Indeks Williamson* sebesar 0,10644 dengan pergerakan berkisar antara 0,10562 hingga 0,10734. Meskipun berada pada kategori ketimpangan rendah, perkembangan nilai indeks di HST menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan secara bertahap dari tahun 2021

hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,10734, sebelum sedikit menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 0,10699. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika ketimpangan pembangunan yang meskipun relatif kecil, namun tetap mengalami perubahan selama periode penelitian. Jika dibandingkan dengan 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, nilai indeks tersebut menempatkan HST pada kelompok menengah dalam tingkat ketimpangan wilayah.

Beberapa daerah seperti Kabupaten Balangan (0,20985), Tabalong (0,19350), dan Kotabaru (0,18115) memiliki nilai ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan HST, sedangkan daerah seperti Hulu Sungai Selatan (0,08599), Banjarbaru (0,06003), dan Tapin (0,00918) menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi tingkat ketimpangan antarwilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana daerah dengan nilai indeks lebih tinggi umumnya merupakan wilayah yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pertambangan, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang lebih bertumpu pada sektor pertanian menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih terkendali. Grafik berikut menunjukkan perkembangan nilai *Indeks Williamson* Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode penelitian.

Gambar 4. 3 Hasil Analisis *Indeks Williamson* Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020-2024



Sumber : Data Diolah, 2026.

Secara visual, grafik *Indeks Williamson HST* memperlihatkan pola garis yang cukup stabil karena angka ketimpangan tiap tahunnya cenderung sama hanya berbeda pada beberapa angka di belakang koma, dengan kecenderungan naik hingga tahun 2023 kemudian sedikit menurun di akhir periode pengamatan. Pola ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di HST tidak terpusat secara berlebihan pada kelompok atau wilayah tertentu, sehingga ketimpangan pendapatan antarwilayah relatif terkendali, meskipun laju pertumbuhan ekonomi daerah ini tidak termasuk yang tertinggi di tingkat provinsi.

B. Pembahasan

1. Potensi Sektor Ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Hasil analisis penelitian ini diperoleh melalui metode *Location Quotient (LQ)*, *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, *Tipologi Klassen*, dan *Shift Share*. Analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, DLQ untuk menilai dinamika pertumbuhan sektoral, *Tipologi Klassen* untuk menentukan posisi sektor dalam struktur ekonomi daerah, serta *Shift Share* untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan dan tingkat daya saing sektoral. Melalui keempat metode tersebut, diperoleh gambaran komprehensif mengenai pola perkembangan sektor ekonomi yang kemudian dianalisis dengan pendekatan teori yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) memiliki karakter agraris yang kuat, namun sedang mengalami proses transformasi menuju sektor jasa dan infrastruktur. Berdasarkan

analisis LQ, sebagian besar sektor tergolong sebagai sektor basis, yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi HST relatif terdiversifikasi. Dalam perspektif teori basis ekonomi oleh Douglas C. North (1956) dikutip dari tulisan (Siregar et al. 2025), sektor basis didefinisikan sebagai sektor yang memiliki keunggulan relatif dan mampu melayani permintaan dari luar wilayah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten HST, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (LQ 1,85) serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (LQ 1,80) menjadi sektor dengan tingkat spesialisasi tertinggi. Tingginya LQ pada sektor akomodasi dan makan minum mencerminkan berkembangnya aktivitas jasa yang berkaitan dengan mobilitas dan pelayanan regional, yang menunjukkan adanya pergeseran menuju ekonomi berbasis layanan.

Di sisi lain, sektor pertanian tetap menjadi basis struktural utama dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Namun, hasil DLQ menunjukkan nilai kurang dari satu (0,69), yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan sektor ini cenderung melemah di masa depan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi struktural tidak selalu diikuti oleh dinamika pertumbuhan yang progresif. Salah satu faktor penyebabnya adalah alih fungsi lahan pertanian yang mengurangi kapasitas produksi, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka panjang (Hidayatullah 2024).

Jika dilihat secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis DLQ pada tabel 4.3 ada beberapa sektor dengan pertumbuhan paling prospektif, yaitu jasa pendidikan (4,99), diikuti oleh informasi dan komunikasi (2,09), administrasi pemerintahan (1,42), jasa kesehatan (1,42), serta konstruksi (1,16). Temuan ini selaras dengan

arah kebijakan pembangunan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2021) tentang RPJMD tahun 2021-2026 yang menekankan pengembangan kualitas sumber daya manusia berbasis IMTAQ dan IPTEK, pengembangan ekonomi daerah, serta pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, berkembangnya sektor jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan juga mencerminkan upaya peningkatan mutu pelayanan publik serta penguatan peran pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. Tingginya nilai DLQ pada sektor jasa pendidikan (4,99) mengindikasikan pertumbuhan yang jauh lebih cepat dibandingkan tingkat provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan sektor pendidikan bukan hanya menjadi prioritas kebijakan normatif, tetapi juga tercermin secara empiris dalam dinamika ekonomi daerah.

Selanjutnya, hasil LQ dan DLQ diperkuat melalui analisis *Tipologi Klassen*. Pembahasan difokuskan pada sektor yang berada pada Kuadran I (basis dan prospektif) karena kuadran ini merepresentasikan sektor unggulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian. Sektor yang termasuk dalam Kuadran I meliputi pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, serta jasa lainnya. Posisi ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut tidak hanya memiliki kontribusi besar terhadap PDRB, tetapi juga tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah acuan, sehingga dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari dinamika perkembangan masing-masing sektor yang secara empiris mencerminkan perubahan struktur ekonomi daerah yang

terjadi pada tahun analisis 2020-2024. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas misalnya, mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi karena didorong oleh meningkatnya kebutuhan listrik dan energi seiring dengan kebutuhan dan pertumbuhan sektor-sektor lain. Pada awal periode analisis, pandemi COVID-19 tahun 2020 justru menciptakan fenomena unik pada konsumsi listrik. Berdasarkan studi *Climate Policy Initiative* oleh Wijaya, Zeki, and Haesras (2021) selama periode Januari hingga Juni 2020, konsumsi listrik di Indonesia mengalami penurunan -7,06% pada sektor industri dan komersial akibat kebijakan pembatasan sosial, namun kebutuhan listrik rumah tangga justru meningkat karena masyarakat lebih banyak tinggal di rumah. Fenomena ini juga terjadi di HST, di mana aktivitas ekonomi yang terbatas justru mendorong peningkatan konsumsi listrik *residensial*. Sektor ini mengalami peningkatan seiring beralihnya pola aktivitas masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pelanggan listrik PLN dari 87.482 pada tahun 2020 menjadi 95.695 pada tahun 2023 (BPS Hulu Sungai Tengah 2024).

Perkembangan tersebut sejalan dengan kinerja sektor konstruksi yang menunjukkan pertumbuhan relatif tinggi akibat meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Aktivitas pembangunan mencakup pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, serta sarana publik lainnya yang didorong oleh belanja modal pemerintah daerah. Peningkatan aktivitas ini tidak hanya memperkuat sektor konstruksi, tetapi juga menimbulkan efek pengganda terhadap sektor lain seperti perdagangan bahan bangunan dan jasa pendukung. Pada periode 2020–2021, sektor ini sempat mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19, sebagaimana ditunjukkan oleh data Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Selatan yang mencatat sekitar 2.518 pelaku usaha konstruksi terdampak akibat terhambatnya proses pengadaan barang dan jasa (Sanusi 2020). Namun, pemulihan mulai terlihat pada periode 2022–2024 yang ditandai dengan meningkatnya nilai PDRB sektor konstruksi, kondisi ini didukung oleh berbagai program pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas publik lainnya. Dukungan kebijakan juga terlihat dari alokasi belanja modal dalam APBD HST sebesar Rp388,50 miliar pada tahun 2026 serta kebijakan pemerintah pusat yang mendorong peningkatan belanja infrastruktur pelayanan publik (Hidayatullah 2025). Rencana pembangunan proyek strategis seperti Bendungan Pancar Hanau dan penyelesaian Bendungan Batang Alai semakin memperkuat prospek pertumbuhan sektor ini (Rahmah 2025), sekaligus menciptakan efek pengganda terhadap sektor pendukung lainnya, termasuk pengadaan listrik dan gas serta jasa lainnya.

Seiring dengan itu, sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang pesat sebagai dampak dari percepatan digitalisasi pasca pandemi COVID-19. Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik, pendidikan jarak jauh, serta aktivitas ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong perkembangan sektor ini. Selama pandemi COVID-19, sektor informasi dan komunikasi menjadi satu-satunya sektor yang masih tumbuh positif di tengah kontraksi ekonomi. Berdasarkan pernyataan Staf Khusus Menteri Kominfo dalam forum G20, sektor ini mencatat pertumbuhan 10,58% *year on year* selama tiga kuartal berturut-turut di tahun 2020, sementara sektor-sektor lain mengalami perlambatan (Suryowati 2022). Pemerintah Kabupaten HST melalui

Dinas Komunikasi dan Informatika juga terus mendorong pengembangan infrastruktur TIK dan sistem informasi pemerintahan untuk mendukung tata kelola yang lebih efisien dan transparan. Sebagaimana diberitakan, Pemkab HST melalui Diskominfo SP terus mematangkan publikasi data statistik melalui FGD yang melibatkan seluruh OPD (Warta Banjar 2026). Upaya ini membutuhkan penguatan infrastruktur dan layanan informasi dan komunikasi yang memadai.

Kondisi tersebut juga tercermin pada sektor administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan yang berkembang seiring dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi birokrasi. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan, program revitalisasi satuan pendidikan, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintah menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan kedua sektor tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor jasa di HST tidak hanya didorong oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh intervensi kebijakan yang terarah. Meskipun secara total dana transfer ke daerah mengalami penurunan, beberapa komponen justru meningkat signifikan. Dana Alokasi Umum (DAU) *Block Grant* naik dari Rp503,34 miliar menjadi Rp721,09 miliar (naik Rp217,75 miliar), dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD naik sebesar Rp8,67 miliar (Soraya 2025). Kenaikan ini menunjukkan adanya perhatian khusus pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan aparatur di daerah. Kebijakan ini secara langsung mendorong pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan.

Temuan ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan posisi strategis HST sebagai pusat pelayanan dan aktivitas ekonomi kawasan Benua Anam. Berdasarkan

kajian mengenai kedudukan dan peran wilayah, Barabai sebagai ibu kota HST berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pelayanan wilayah belakang, serta pusat perdagangan dan jasa regional. Selain itu, secara geografis Barabai memiliki letak yang strategis sebagai simpul penghubung antar wilayah di Kalimantan Selatan, bahkan menjadi jalur transit yang menghubungkan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur (Nawwar et al. 2023). Kondisi ini menjelaskan mengapa sektor jasa publik dan infrastruktur mampu tumbuh lebih cepat dan menempati posisi unggulan dalam struktur ekonomi daerah.

Sektor Jasa Kesehatan berada di Kuadran I karena didorong oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan pasca pandemi COVID-19. Pandemi yang melanda Indonesia sejak awal 2020 telah menjadikan sektor kesehatan menjadi sektor yang sangat penting, bahkan pada tahun 2020 didapat dari Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa 50% anggaran APBD HST dialokasikan untuk Penanganan Covid-19. Pembangunan dan peningkatan layanan puskesmas, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan lainnya menjadi prioritas daerah dan terus meningkat terlihat dari total PDRB yang kian tumbuh.

Hal yang sama terlihat pada sektor jasa pendidikan yang menunjukkan pertumbuhan sangat signifikan keberadaan sektor ini pada kuadran satu menunjukkan posisinya sebagai sektor basis prospektif yang terus tumbuh cepat dimasa mendatang. Capaian nyata terlihat pada tahun 2025 di mana Kabupaten Hulu Sungai Tengah jumlah penerima revitalisasi satuan pendidikan terbanyak se-

Kalimantan Selatan pada tahun 2025 melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digagas Kemendikdasmen. Sebanyak 55 satuan pendidikan telah rampung direvitalisasi, terdiri dari 8 PAUD, 21 SD, dan 26 SMP (Rahmah 2026). Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sarana pendidikan tetapi juga melibatkan tenaga kerja lokal sehingga menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian.

Dalam perspektif teori *growth pole* yang dikemukakan oleh Perroux (1955) dikutip dalam tulisan (Kisiała and Suszynska 2017) sektor dengan pertumbuhan tinggi berpotensi menjadi pusat pertumbuhan yang mendorong sektor lain melalui efek penyebaran (*spread effect*). Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan HST bahwa program revitalisasi pendidikan terbukti tepat sasaran, berbasis data, dan langsung menyentuh warga sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal (Rahmah 2026).

Sektor Jasa Lainnya yang berada di Kuadran I mencakup berbagai aktivitas jasa yang tidak tercakup dalam kategori lain, seperti jasa perorangan yang melayani kebutuhan rumah tangga (jasa salon, *laundry*, reparasi, dan lain-lain), jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa kebudayaan. Menurut klasifikasi BPS, kategori ini mencakup aktivitas organisasi keanggotaan, perbaikan komputer dan barang pribadi, serta jasa perorangan lainnya. Pertumbuhan sektor ini didorong oleh meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pasca pandemi, serta perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan di Barabai yang semakin modern. Kembalinya mobilitas dan aktivitas sosial setelah pembatasan pandemi berkontribusi pada pemulihan sektor ini. Selain itu, program revitalisasi pendidikan

dan digitalisasi layanan publik juga menciptakan permintaan terhadap jasa pendukung seperti perbaikan perangkat TIK dan layanan kebersihan.

Keberadaan sektor jasa publik dan infrastruktur yang berada pada Kuadran I mengindikasikan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah sedang mengalami proses diversifikasi ekonomi menuju sektor yang lebih modern. Dalam perspektif teori transformasi struktural yang dikemukakan oleh, Arthur Lewis (1952) dikutip dalam tulisan (Amalia et al. 2022) pembangunan ekonomi ditandai oleh pergeseran aktivitas ekonomi dan tenaga kerja dari sektor tradisional menuju sektor modern yang lebih produktif. Pergeseran ini mencerminkan adanya alokasi sumber daya yang lebih efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan itu, studi Hubbansyah et al. (2023) menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mengalami transformasi dari dominasi sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa, di mana perpindahan tenaga kerja tersebut berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas serta *output* ekonomi secara keseluruhan.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa peningkatan kontribusi sektor jasa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional apabila didukung oleh produktivitas yang tinggi dan keterkaitan antar sektor (*sectoral linkages*) yang kuat. Jin and Li (2025) menjelaskan bahwa keterkaitan antar sektor (*sectoral linkages*) berperan penting dalam memperkuat pertumbuhan sektor jasa melalui mekanisme permintaan *input* antar sektor, sehingga layanan seperti pendidikan dan kesehatan tidak hanya berdiri sendiri tetapi turut merangsang aktivitas ekonomi di sektor lain seperti perdagangan dan perumahan. Dengan demikian, temuan Kuadran I pada HST memperkuat argumen

bahwa transformasi struktural tidak hanya berupa pergeseran komposisi, tetapi juga menciptakan jaringan keterkaitan antar sektor yang mendorong pembangunan ekonomi wilayah secara lebih berkelanjutan.

Sementara itu, sektor yang selama ini mendominasi struktur PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, *serta real estate* justru berada pada Kuadran III (basis namun non-prospektif). Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor-sektor tersebut masih memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, laju pertumbuhannya relatif lebih rendah dibandingkan wilayah acuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kekuatan struktural yang bersifat historis belum sepenuhnya diikuti oleh dinamika pertumbuhan yang progresif. Dalam konteks HST yang secara geografis dan ekonomi masih bercorak agraris, situasi ini dapat dipahami sebagai fase transisi, di mana sektor tradisional tetap menjadi penopang utama, namun mulai menghadapi tekanan dari perubahan struktur ekonomi.

Secara lebih spesifik, sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan didapat dari data HST dalam angka oleh BPS Hulu Sungai Tengah (2025), luas panen padi sawah mengalami fluktuasi dari 36.709 hektare (2020) menjadi 29.222 hektare (2023) dan kembali meningkat menjadi 36.781 hektare (2024). Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah (2024) mencatat penurunan produksi disebabkan banjir bandang, serangan OPT, dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Penelitian (Khairunnisa and Suherty (2020) tentang dampak alih usaha pertanian di Desa Banua Binjai, Kecamatan Pandawan, HST menunjukkan bahwa alih fungsi lahan terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya

tenaga kerja untuk mengelola lahan, tekanan ekonomi keluarga, dan keinginan untuk membuka usaha baru. Penelitian Royensyah, Safitri, and Susanti (2025) sebelumnya menemukan sektor pertanian sebagai basis menggunakan data 2017-2019, namun temuan ini memperbarui bahwa dinamika pertumbuhannya mulai melambat pasca pandemi.

Di sisi lain, sektor industri pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) masih terbatas dalam menciptakan nilai tambah akibat rendahnya penggunaan teknologi dan ketergantungan bahan baku yang tidak stabil. Penelitian oleh Hidayah, Mariani, and Hidayat (2012) di Kecamatan Batang Alai Utara menunjukkan bahwa pengolahan karet rakyat masih pada tingkat sedang, dengan penggunaan koagulan yang tidak sesuai sehingga menghambat produksi bernilai tinggi. Kondisi ini membuat sektor industri pengolahan berkembang lebih lambat dibanding sektor jasa yang lebih adaptif. Sebagai perbandingan, UMKM di Kabupaten Tabalong yang mendapat pendampingan teknologi sejak 2017 mampu berkembang pesat dalam mengolah ikan lokal dengan omzet mencapai Rp217 juta per tahun (Lasmianti 2024). Akibatnya, kontribusi industri pengolahan HST menurun dari 14,04% (2020) menjadi 12,63% (2024), menunjukkan kesenjangan kapasitas dan perlunya intervensi melalui transfer teknologi serta penguatan keterkaitan hulu-hilir.

Walaupun fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi sektor unggulan pada Kuadran I, analisis terhadap sektor-sektor pada kuadran lainnya tetap diperlukan sebagai pelengkap dalam memahami struktur dan potensi ekonomi daerah, terutama sektor-sektor yang bersifat prospektif dan memiliki peluang

berkembang menjadi sektor basis di masa mendatang. Dalam hal ini, sektor yang termasuk dalam Kuadran II (non-basis tetapi prospektif) adalah sektor pertambangan dan penggalian serta jasa keuangan dan asuransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusinya terhadap PDRB daerah masih relatif kecil, kedua sektor tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang cepat dan berpeluang menjadi sektor basis di masa depan. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian didorong oleh meningkatnya aktivitas penggalian bahan galian untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur lokal, sementara sektor jasa keuangan dan asuransi berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, transaksi keuangan, serta inklusi keuangan masyarakat pasca pandemi.

Selanjutnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dilakukan melalui analisis *Shift Share* untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan dan tingkat daya saing sektoral di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara umum, seluruh sektor memiliki nilai *Dij* positif yang menunjukkan bahwa semua sektor mengalami pertumbuhan selama periode penelitian. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mencatat nilai pertumbuhan absolut (*Dij*) terbesar yaitu 111,21 miliar rupiah, diikuti oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan 94,60 miliar rupiah, Sektor Konstruksi dengan 87,85 miliar rupiah, Sektor Informasi dan Komunikasi dengan 84,63 miliar rupiah, Sektor Jasa Pendidikan dengan 76,25 miliar rupiah, Sektor Industri Pengolahan dengan 75,64 miliar rupiah, serta Sektor Administrasi Pemerintahan dengan 67,89 miliar rupiah. Pola ini sejalan dengan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan, di mana sektor-sektor tersebut

juga menjadi penyumbang utama PDRB, sehingga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi HST masih mengikuti dinamika ekonomi regional.

Dilihat dari komponen *Competitive Share* (Cij), terdapat 6 sektor yang benar-benar mencerminkan keunggulan kompetitif daerah meliputi Jasa Pendidikan (24,77 miliar rupiah), Administrasi Pemerintahan (12,45 miliar rupiah), Informasi dan Komunikasi (6,25 miliar rupiah), Konstruksi (2,26 miliar rupiah), serta Pengadaan Air (0,09 miliar rupiah) dan Jasa Kesehatan (0,61 miliar rupiah) yang menunjukkan nilai Cij positif, yang menunjukkan jika pertumbuhannya murni karena kekuatan internal daerah. Di sisi lain, sektor Pertanian memiliki Cij negatif -35,41 miliar rupiah dan sektor Industri Pengolahan dengan Cij -49,16 miliar rupiah, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhannya lebih dipengaruhi oleh dinamika ekonomi di tingkat provinsi dibandingkan oleh keunggulan spesifik yang dimiliki daerah.

Sejalan dengan temuan Khusaini (2015) yang menunjukkan bahwa sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian belum tentu memiliki keunggulan kompetitif. Di HST, sektor Pertanian (kontribusi 23,18%) justru ber-Cij negatif (-35,41), sementara sektor Jasa Pendidikan dan lainnya yang kontribusinya lebih kecil justru unggul secara kompetitif. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tidak semua sektor dengan kontribusi besar memiliki daya saing tinggi, melainkan sektor jasa tertentu yang mampu tumbuh lebih cepat karena faktor internal wilayah.

Fenomena ini dapat dijelaskan karena struktur perekonomian HST yang secara historis berbasis agraris mulai mengalami diversifikasi menuju sektor jasa yang lebih modern. Sektor pertanian yang masih dominan secara struktural namun

memiliki Cij negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan pertanian lebih mengikuti tren umum ketimbang murni didorong oleh keunggulan kompetitif lokal, yang mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan teknologi, rendahnya produktivitas, dan alih fungsi lahan. Di sisi lain, sektor jasa pendidikan, administrasi pemerintahan, konstruksi, dan informasi-komunikasi memiliki komponen *competitive share* positif karena sektor-sektor ini secara internal telah memiliki kemampuan untuk menarik faktor produksi lebih efektif, beradaptasi dengan permintaan pasar, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan daerah yang mendukung. Hal ini sejalan dengan pendapat Albert Hirschman (1963) diutip dari tulisan (Alacevich 2017) melalui teori keterkaitan (*linkages theory*), di mana keterkaitan antar sektor melalui permintaan *input* dan *output* dapat memperkuat posisi sektor utama dalam suatu wilayah.

Secara praktis, temuan *Shift Share* ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan daerah perlu memperkuat sektor jasa dan infrastruktur yang telah terbukti kompetitif agar dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang lebih luas terhadap perekonomian lokal. Upaya pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan publik, dan investasi yang berkelanjutan pada infrastruktur dapat memperdalam keunggulan kompetitif ini dan memperluas dampaknya ke sektor lain seperti perdagangan dan jasa pendukung. Sementara itu, revitalisasi sektor tradisional seperti pertanian melalui peningkatan produktivitas, modernisasi teknologi, dan pengembangan *hilirisasi* tetap penting untuk memastikan bahwa kontribusi sektor ini tetap stabil dan tidak tertinggal dalam

proses transformasi struktural yang sedang berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan hubungan empiris dan teori tersebut, implikasi teoretis dari hasil ini menunjukkan bahwa daerah seperti HST yang berhasil memosisikan sektor jasa dalam status unggulan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan produktif. Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan daerah yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik (seperti pendidikan dan kesehatan), pengembangan kapasitas tenaga kerja jasa, serta investasi infrastruktur untuk memperluas efek *multiplier* terhadap sektor lain. Hal ini juga sejalan dengan temuan Transformasi Struktural Indonesia yang mengaitkan melibatkan pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, serta terkait erat dengan faktor-faktor seperti modal manusia, teknologi, dan infrastruktur sebagai pendorong perubahan struktural (Nanga and Widjaja 2024).

2. Tingkat Disparitas Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai tengah

Hasil perhitungan *Indeks Williamson* menunjukkan tingkat disparitas pembangunan yang mencerminkan adanya ketimpangan dalam pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang tergolong rendah, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Nilai rata-rata *Indeks Williamson* HST sebesar 0,10644 mengindikasikan bahwa distribusi aktivitas ekonomi relatif merata dan tidak terjadi konsentrasi pendapatan yang signifikan pada wilayah tertentu. Secara empiris, nilai ini berada jauh di bawah ambang 0,3 yang umumnya digunakan sebagai indikator ketimpangan tinggi. Apabila ditelaah lebih mendalam, terdapat kecenderungan peningkatan nilai *Indeks Williamson* HST dari tahun 2020

hingga 2023, yaitu dari 0,10568 (2020) menjadi 0,10734 (2023), sebelum sedikit menurun menjadi 0,10699 pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan masih tergolong rendah, terdapat dinamika peningkatan yang perlu diwaspadai, terutama pada periode pemulihan ekonomi pasca pandemi di mana aktivitas ekonomi mulai berkegiatan kembali. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di HST cenderung tersebar, meskipun laju pertumbuhannya tidak termasuk yang tertinggi di tingkat provinsi.

Dalam perspektif hipotesis Williamson (1965) mengenai kurva U-terbalik (*inverse U-shape curve*), ketimpangan regional cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan ketika pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu, kemudian menurun seiring menyebarnya proses pembangunan. Rendahnya nilai ketimpangan di HST menunjukkan bahwa daerah ini belum mengalami konsentrasi pertumbuhan yang tajam seperti yang terjadi pada wilayah berbasis industri atau pertambangan besar. Kondisi ini berbeda dengan beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki dominasi sektor pertambangan batu bara dan sumber daya alam, di mana aktivitas ekonomi cenderung terpusat dan berpotensi meningkatkan disparitas pendapatan.

Terdapat kesenjangan menarik antara temuan Arif Maulana (2021) dan Asyahri (2018) mengenai posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam struktur ketimpangan Kalimantan Selatan. Penelitian Arif Maulana (2021) mengungkapkan bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Kalimantan Selatan periode 2010-2017 masih tergolong mengkhawatirkan dengan nilai *Indeks Williamson* sekitar 0,5, di mana kabupaten dengan ketergantungan besar pada pertambangan batu bara

berada pada kuadran II (daerah maju tetapi tertekan) dan kuadran IV (daerah tertinggal), posisinya berbanding terbalik dengan daerah yang tidak bergantung pada sektor tersebut berdasarkan *Tipologi Klassen*. Sementara itu, penelitian Asyahri (2018) justru menempatkan Kabupaten HST dalam kuadran II *Tipologi Klassen*, yang berarti daerah berkembang cepat dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun pendapatan per kapita masih relatif rendah dibandingkan rata-rata provinsi. Posisi ini menempatkan HST dalam Kawasan Andalan Kandangan bersama Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, dan Tapin. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun HST belum mencapai status daerah cepat maju (kuadran I) seperti Kabupaten Tanah Bumbu, Tabalong, Balangan, dan Kotabaru, daerah ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik dengan tingkat ketimpangan yang relatif rendah, sehingga menjadikannya kasus unik yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks disparitas antarwilayah di Kalimantan Selatan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan antara struktur ekonomi dan ketimpangan dapat ditemukan dalam penelitian Warsito (2020) tentang produktivitas sebagai penentu disparitas pendapatan antardaerah di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa ketergantungan pada sektor pertanian cenderung menghasilkan pendapatan per kapita yang rendah, sementara sektor pertambangan justru mendorong pendapatan per kapita yang tinggi namun dengan pola distribusi yang tidak merata. Temuan ini relevan untuk menjelaskan kondisi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana dominasi sektor pertanian dengan produktivitas rendah berkontribusi pada rendahnya pendapatan per kapita, tetapi

sekaligus menghasilkan tingkat ketimpangan yang lebih rendah karena distribusi aktivitas ekonominya relatif merata.

Secara struktural, ekonomi HST yang berbasis pertanian dan sektor jasa publik menyebabkan aktivitas ekonomi tidak terkonsentrasi pada satu pusat pertumbuhan dominan. Sektor pendidikan, administrasi pemerintahan, perdagangan, serta jasa lainnya tersebar di berbagai kecamatan dan melibatkan pelaku ekonomi yang lebih luas. Ketiadaan proyek ekstraktif berskala besar juga membatasi terjadinya konsentrasi pendapatan yang ekstrem. Faktor-faktor ini menjelaskan stabilitas nilai *Indeks Williamson* HST selama periode pengamatan dan menunjukkan bahwa distribusi pembangunan relatif terkendali.

Hal ini sejalan dengan visi pembangunan HST yang termuat dalam semboyan "Murakata", yang bermakna mufakat dan seia sekata baik dalam pemikiran maupun dalam pelaksanaan. Filosofi ini mencerminkan semangat kebersamaan dan pemerataan dalam pembangunan, di mana hasil-hasil pembangunan didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu. Visi ini menjadi landasan filosofis yang memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah di HST.

Dari sisi teoritis, temuan ini memperkuat argumen bahwa ketimpangan regional sangat dipengaruhi oleh pola konsentrasi sektor unggulan dan karakteristik struktur ekonomi daerah. Dalam perspektif teori pembangunan ekonomi konvensional yang dikemukakan Todaro dan Smith (2012), pembangunan ekonomi yang berhasil harus memenuhi tiga nilai pokok: efisiensi (*efficiency*), keberlanjutan

(*sustainability*), dan pemerataan (*equity*). Rendahnya ketimpangan di HST menunjukkan bahwa dimensi pemerataan (*equity*) telah tercapai, meskipun dimensi efisiensi dan produktivitas ekonomi masih perlu ditingkatkan mengingat laju pertumbuhan ekonomi HST masih berada di bawah rata-rata provinsi. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Umer Chapra, pembangunan harus berlandaskan pada *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Rendahnya ketimpangan di HST mencerminkan upaya mewujudkan keadilan distribusi dan pemerataan kesejahteraan (*falah*), sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr (59): 7 yang menegaskan bahwa harta harus beredar secara merata agar tidak tertumpuk di satu kalangan saja. Dengan demikian, kondisi ketimpangan yang rendah di HST tidak hanya relevan dengan teori pembangunan konvensional tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Namun demikian, ketimpangan yang rendah tidak selalu identik dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Nilai *Indeks Williamson* yang rendah juga dapat mencerminkan bahwa tingkat pendapatan antarwilayah relatif seragam pada level yang masih moderat dibandingkan daerah maju berbasis industri atau pertambangan. Pola kecenderungan peningkatan nilai *Indeks Williamson* dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi pasca pandemi perlu diiringi dengan kebijakan yang memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata. Jika tidak dikelola dengan baik, peningkatan aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu berpotensi memperlebar ketimpangan di masa mendatang. Oleh karena itu, tantangan pembangunan HST

tidak hanya menjaga pemerataan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan produktivitas pertumbuhan ekonomi agar mampu menaikkan pendapatan per kapita secara berkelanjutan tanpa memicu kesenjangan baru.

Secara praktis, implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan adalah perlunya strategi pembangunan yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, yang sejalan dengan semangat "Murakata" sebagai semboyan HST. Pemerintah daerah perlu memperkuat sektor-sektor produktif yang memiliki daya saing, seperti jasa dan infrastruktur, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui modernisasi teknologi dan pengembangan nilai tambah. Kebijakan ini harus diimplementasikan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sesuai dengan prinsip mufakat yang menjadi ciri khas pembangunan HST. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas distribusi pendapatan yang selama ini relatif terkendali di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ke depan, pemerintah daerah perlu mencermati kecenderungan peningkatan ketimpangan pada tahun 2022-2023 sebagai *early warning system* untuk merumuskan kebijakan antisipatif, seperti penguatan ekonomi desa, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, serta pemerataan infrastruktur ke kecamatan-kecamatan yang masih tertinggal agar proses transformasi struktural yang sedang berlangsung dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.